

Delik penodaan agama: penerapan pasal 156A KUHP dalam putusan-putusan pengadilan = The crime of blasphemy: the implementation of the article 156A of the Indonesian criminal code in court decisions

Avisena Ilma Rachmasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474651&lokasi=lokal>

Abstrak

Sejak Reformasi 1998 hingga tahun 2017, jumlah kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia meningkat tajam dari 9 kasus menjadi lebih dari 88 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut Pasal 156a KUHP menjadi pasal yang sering digunakan baik dalam amar putusan hakim. Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan delik penodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Permasalahan yang kerap muncul dalam penerapan Pasal 156a KUHP di pengadilan adalah mengenai tidak jelasnya tolak ukur perbuatan sebagai dasar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Untuk menganalisis masalah tersebut, dilakukan penelitian normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-perundangan pidana, pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesimpangsiuran terkait model penanganan kasus penodaan agama di Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pemaknaan Pasal 156a KUHP di kalangan akademisi maupun praktisi yang memaknai konstruksi pasal ini sebagai gabungan unsur tindak pidana yang bersifat kumulatif dan yang memaknainya secara alternatif. Dalam praktiknya di pengadilan, hakim cenderung menerapkan Pasal 156a KUHP dengan konstruksi huruf a dan huruf b dalam pasal tersebut secara alternatif namun tanpa pertimbangan hukum yang memadai.

.....

The number of blasphemy cases have increased significantly from only 9 cases in the New Order 1967 1998 to more than 88 cases in the post Reformation era. Those cases have brought people to jail using article 156a of Indonesian Criminal Code KUHP. This thesis discusses the history and the development of blasphemy law which is regulated in the article 156a of the Indonesian Criminal Code and Law No. 1 PNPS of 1965 on Prevention of Misuse and or Blasphemy. The implementation of the law has brought problems related to the unclear criteria to elucidate the elements of the blasphemous acts. To analyze the problem, the author conducted a normative research focusing on the analysis of the criminal provision, jurists opinion, and a number of court decisions. This research shows that there is an inconsistency to handle blasphemy cases in Indonesia. There are two dominant views among the academics as well as the practitioners in defining blasphemy as it is stipulated in the article of 156a Indonesian Criminal Code. The first view believes that the construction of the article is 'a double offence' double opzet in which all its elements should be proven while the other side interprets the a and b elements in the article alternatively. This thesis concludes that the judges tend to apply article 156a by interpreting the a and b elements in the article alternatively without some adequate legal arguments. Keywords blasphemy defamation of religion article 156a Indonesia's Criminal Code verdict analysis criminal law.